

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI DINAS KETAHANAN PANGAN KOLAKA UTARA (STUDI IMPLEMENTASI MODEL GRINDLE)

Waode Helvi Mei Hamka¹, Andi Nurhidayah², Nuryanti Mustari³

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar

¹helvimeihamka@gmail.com, ²andinurhidayahy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of food security policy at the Food Security Office of North Kolaka Regency using Grindle's policy implementation model. A qualitative descriptive approach was employed through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that the policy content has been clearly formulated in terms of objectives, target groups, benefits, activities, resources, and expected changes. However, limitations in human resources, budget allocation, and supporting infrastructure reduce policy effectiveness. From the implementation context perspective, multi-level actors are involved, but differences in interests, local political dynamics, and socio-economic conditions influence program distribution. Although positive changes have emerged in priority villages—such as increased household food production and income diversification—the implementation has not yet been evenly distributed. Strengthening institutional coordination, increasing budget support, and enhancing community empowerment are necessary to improve sustainable food security governance at the local level.

Keywords: policy implementation, food security, Grindle model, local governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan Grindle. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kebijakan telah dirumuskan secara jelas mencakup tujuan, sasaran, manfaat, kegiatan, sumber daya, dan tingkat perubahan yang diharapkan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana prasarana menghambat efektivitas implementasi. Dari aspek konteks implementasi, keterlibatan multi-aktor telah berjalan, tetapi perbedaan kepentingan, dinamika politik lokal, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat memengaruhi distribusi program. Perubahan positif mulai terlihat pada desa prioritas berupa peningkatan produksi pangan rumah tangga dan diversifikasi pendapatan, namun implementasi belum merata. Diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan dukungan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, ketahanan pangan, model Grindle, tata kelola daerah

A. Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan (FAO, 2015). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ketahanan pangan menjadi prioritas nasional yang kemudian diimplementasikan di tingkat daerah melalui mekanisme otonomi.

Kabupaten Kolaka Utara memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor pertanian, sehingga kebijakan ketahanan pangan menjadi pilar penting pembangunan daerah. Data BPS menunjukkan kontribusi signifikan sektor pertanian terhadap PDRB daerah. Namun demikian, tantangan seperti alih fungsi lahan, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan dukungan teknis menjadi hambatan dalam menjaga stabilitas produksi pangan.

Secara teoritis, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan,

tetapi juga oleh konteks sosial dan politik tempat kebijakan dilaksanakan. Grindle (2017) menegaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama: content of policy dan context of implementation. Model ini relevan untuk menganalisis kebijakan ketahanan pangan yang melibatkan banyak aktor dan dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis isi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara.
2. Mendeskripsikan konteks implementasi kebijakan berdasarkan dinamika aktor dan lingkungan sosial ekonomi.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses

pelaksanaan kebijakan serta dinamika yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para pelaksana dan kelompok sasaran.

Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu memilih pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Informan terdiri atas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, staf teknis pelaksana program, serta petani penerima dan non-penerima bantuan. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan dan dampaknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel Model Implementasi Kebijakan Grindle, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap laporan program, data indeks kerawanan pangan, serta dokumen perencanaan daerah untuk memperkuat data hasil wawancara.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara telah berjalan sesuai dengan perencanaan program, namun efektivitasnya belum optimal. Analisis dilakukan berdasarkan dua variabel Model Implementasi Kebijakan Grindle (2017), yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dari aspek isi kebijakan, tujuan program telah dirumuskan secara jelas, yaitu meningkatkan ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong kemandirian pangan rumah tangga. Program yang dijalankan meliputi Pekarangan Pangan Lestari (P2L), bantuan ternak,

diversifikasi pangan lokal, serta Gerakan Pangan Murah.

Manfaat kebijakan mulai dirasakan di desa prioritas, terutama dalam bentuk peningkatan produksi pangan rumah tangga dan tambahan pendapatan dari hasil ternak. Namun, distribusi program belum merata karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Menurut Grindle (2017), keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, manfaat yang dirasakan kelompok sasaran, serta ketersediaan sumber daya. Dalam konteks ini, meskipun substansi kebijakan telah dirancang dengan baik, keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Dari aspek konteks implementasi, kebijakan melibatkan berbagai aktor, yaitu Dinas Ketahanan Pangan sebagai leading sector, pemerintah kecamatan dan desa, serta kelompok tani. Keterlibatan multi-aktor ini menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, koordinasi antar-aktor belum sepenuhnya optimal.

Perbedaan prioritas dan keterbatasan anggaran memengaruhi penentuan lokasi sasaran program. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih lemah menyebabkan sebagian masyarakat bergantung pada bantuan pemerintah.

Grindle (2017) menegaskan bahwa konteks politik, kepentingan aktor, dan kapasitas birokrasi sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan telah terbentuk, kapasitas sumber daya dan dinamika kepentingan lokal masih memengaruhi capaian program.

Secara keseluruhan, perubahan positif telah terlihat pada desa-desa prioritas, terutama dalam peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. Namun, tingkat perubahan tersebut belum signifikan dan belum menjangkau seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada dukungan sumber daya dan kondisi lingkungan implementasinya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara telah berjalan sesuai dengan desain kebijakan dan menunjukkan dampak positif, terutama pada desa-desa prioritas. Dari aspek **isi kebijakan** (*content of policy*), tujuan, program, dan manfaat kebijakan telah dirumuskan secara jelas serta dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana menjadi kendala utama dalam memperluas cakupan program.

Dari aspek **konteks implementasi** (*context of implementation*), keterlibatan berbagai aktor telah terbentuk dengan pembagian peran yang relatif jelas. Meskipun demikian, koordinasi lintas sektor, perbedaan prioritas antar-aktor, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat masih memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Perubahan dalam bentuk peningkatan produksi pangan rumah tangga dan diversifikasi konsumsi telah terlihat, tetapi belum signifikan dan belum merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan:

1. Peningkatan alokasi anggaran dan kapasitas sumber daya manusia untuk memperluas jangkauan program.
2. Penguatan koordinasi antar-lembaga dan transparansi dalam penentuan sasaran program.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih rinci dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan dan indeks ketahanan pangan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Hariyanto, E. (2019). Peran kepemimpinan kepala daerah dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 145–162.
- Ariani, M., & Suryana, A. (2023). Analisis kebijakan pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 1–20.

<https://doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.1-20>

Darmawan, A. B. (2023). Implementasi kebijakan SDGs pemerintah daerah dalam mengelola ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19 (Studi kasus Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 145–165.
<https://doi.org/10.22146/jkn.87986>

Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ibnu. (2025). Ketahanan pangan dan dimensi pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pangan dan Pembangunan*, 12(1), 55–70.

Matar, M. (2002). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mukinta. (2020). Implementasi kebijakan ketahanan pangan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 45–56.

Nathan. (2025). Tantangan implementasi diversifikasi pangan di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 33–49.

Nugroho, R. (2023). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, R., & Saputra, A. (2019). Collaborative governance dalam kebijakan ketahanan pangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(1), 45–60.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (2002). *Implementation*. Berkeley, CA: University of California Press.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Politik lokal dan implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 201–215.

Putra, H. D., Lionardo, A., & Agus, A. (2022). Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang (Studi Dinas Ketahanan Pangan Kota Palembang). *Tanah Pilih*, 2(2), 85–99.

Risdianto, R., et al. (2024). Faktor sosial dan politik dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 77–92.

Suharno, & Adi, P. H. (2020). Dinamika aktor dan budaya lokal dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 12(2), 67–84.

Suhirmanto, S., Pramesti, E. S., & Samudra, F. B. (2025). Hubungan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan ketahanan pangan keluarga melalui partisipasi anggota KWT di Desa Ngembal Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 31(2), 234–243.
<https://doi.org/10.22146/jkn.109502>

Wahyudi, A., & Sari, D. P. (2021). Kepatuhan dan responsivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan pertanian. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 56–73.

Yuliani, L. (2021). Implementasi kebijakan penerapan lumbung pangan masyarakat di Desa Suriamedal Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.